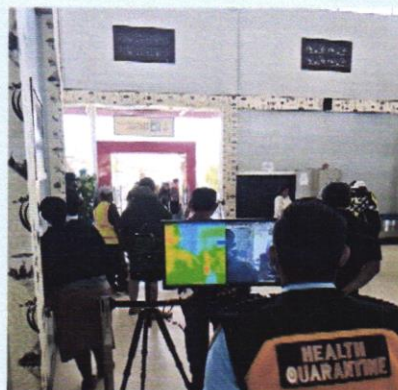


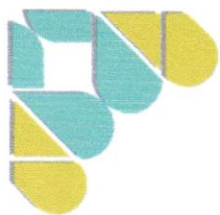
Kemenkes
BKK Jayapura

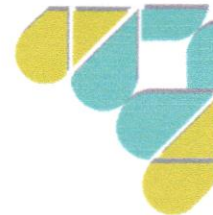
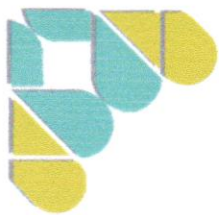


RENCANA KERJA TAHUNAN TAHUN 2026

**BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN
KELAS I JAYAPURA**







KATA PENGANTAR



Dengan Rasa Syukur atas Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa atas Berkat dan Karunia-Nya sehingga Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2026 ini dapat diselesaikan.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kekarantina di pintu masuk negara dengan menjabarkan tujuan dan sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, target kinerja dan kegiatan.

Sebagai buku Rencana Kinerja Tahunan untuk tahun 2026, kami merasakan laporan ini masih memiliki banyak kekurangan karena dukungan data yang belum memadai terutama data-data yang digunakan sebagai bahan analisis situasi, prioritas program/kegiatan, dan upaya rencana aksi. Selanjutnya kedepan akan terus disempurnakan dan disesuaikan dengan perkembangan kegiatan dipintu masuk negara. Diharapkan program dan kegiatan dalam RKT tahun 2026 dapat dijadikan dasar dan acuan dalam melaksanakan upaya mencegah masuk keluarnya penyakit. Sebagai satuan kerja, diharapkan RKT tahun 2026 dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana kerja dan sasaran kerja pegawai.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berproses bersama dan mendukung tersusunnya Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2026 ini, semoga laporan ini menjadi dokumen bersama dan dijadikan acuan dalam pelaksanaan Dukungan Manajemen semoga bermanfaat bagi kita semua.

Jayapura, Februari 2026
Kepala BKK Kelas I Jayapura



dr. Bambang Budiman, M.M
NIP. 196905312006041001





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GRAFIK	iiiv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I._PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. STRUKTUR ORGANISASI.....	3
C. SUMBER DAYA MANUSIA.....	7
BAB II._VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN.....	11
A. VISI	11
B. MISI.....	11
C. TUJUAN.....	13
D. SASARAN STRATEGIS	14
BAB III._INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	17
1. RENCANA AKSI KEGIATAN TAHUN 2025 – 2029	17
2. RENCANA KERJA TAHUN 2026.....	18
3. RINCIAN KEGIATAN BERDASARKAN KEGIATAN.....	19
4. KERANGKA PENDANAAN.....	21
BAB IV._PENUTUP	24
LAMPIRAN	25



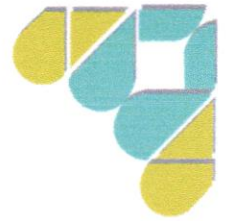
DAFTAR GRAFIK

- Grafik 1.** Jumlah ASN berdasarkan Jenis Kelamin BKK Kelas I Jayapura Tahun 2026..... 7
- Grafik 2.** Jumlah ASN berdasarkan Jenis Jabatan Tahun 2026 BKK Kelas I Jayapura 8
- Grafik 3.** Jumlah ASN berdasarkan Penempatan Tahun 2026 BKK Kelas I Jayapura 9
- Grafik 4.** Jumlah Outsourcing berdasarkan Jenis Tahun 2026 BKK Kelas I Jayapura..... 10



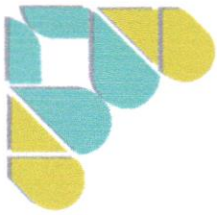
DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah ASN berdasarkan Jenis Jabatan BKK Kelas I Jayapura Tahun 2026	8
Tabel 2. Distribusi Target Indikator Kinerja Kegiatan dalam RAK Tahun 2025 – 2029 BKK Kelas I Jayapura	17
Tabel 3. Distribusi Rencana Kerja Tahunan Tahun 2026 BKK Kelas I Jayapura	18
Tabel 4. Distribusi Kegiatan Rincian Output Tahun 2026 BKK Kelas I Jayapura.....	20
Tabel 5. Kerangka Pendanaan Tahun Berjalan dan Perkiraan Maju Tahun 2025 - 2029 BKK Kelas I Jayapura.....	22



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Tahun 2026 BKK Kelas I Jayapura	4
--	---



BAB I.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK) Kelas I Jayapura sebagai UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan memiliki tugas pokok dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis bidang kekarantinaan kesehatan yang mempunyai tugas melaksanakan upaya cegah tangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan di wilayah kerja pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara. Dalam melaksanakan tugas tersebut BKK Kelas I Jayapura melaksanakan 9 fungsi, yaitu penyusunan rencana, kegiatan, dan anggaran; pelaksanaan pengawasan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan; pelaksanaan pencegahan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan; pelaksanaan respons terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan; pelaksanaan pelayanan kesehatan pada kegawatdaruratan dan situasi khusus; pelaksanaan penindakan pelanggaran di bidang kekarantinaan kesehatan; pengelolaan data dan informasi di bidang kekarantinaan kesehatan; pelaksanaan jejaring, koordinasi, dan kerja sama di bidang kekarantinaan kesehatan; pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kekarantinaan kesehatan; pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kekarantinaan kesehatan. Dan pelaksanaan urusan administrasi UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan.

Perkembangan global yang ditandai dengan meningkatnya mobilitas manusia, barang, alat angkut, serta perdagangan internasional telah meningkatkan risiko masuk dan keluarnya faktor risiko kesehatan melalui pintu masuk negara. Di sisi lain, perubahan iklim, munculnya *new emerging diseases*, *emerging diseases* dan *re-emerging diseases* serta ancaman kedaruratan kesehatan masyarakat menuntut sistem



kekarantinaan kesehatan yang semakin adaptif, responsif, dan berbasis deteksi dini. Dalam menghadapi tantangan tersebut, Balai Karantina Kesehatan (BKK) dituntut untuk terus meningkatkan kapasitas dalam melakukan pengawasan, deteksi dini, identifikasi faktor risiko kesehatan, serta respons cepat terhadap potensi ancaman kesehatan di pintu masuk negara. Penguatan kemampuan sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi surveilans, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta sinergi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas pelaksanaan kekarantinaan kesehatan. Dengan kapasitas deteksi dan respons yang semakin kuat, BKK berperan strategis dalam mencegah masuk, keluar, dan menyebarnya penyakit maupun faktor risiko kesehatan yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, sekaligus menjaga ketahanan kesehatan nasional.

Dalam mewujudkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, BKK Kelas I Jayapura dituntut mampu menangkal risiko kesehatan yang mungkin masuk dari Negara lain atau dari daerah lain dengan melakukan tindakan tanpa menghambat perjalanan dan perdagangan, sesuai dengan *International Health Regulation (IHR)* tahun 2005 terutama dalam hal penanggulangan *Public Health Emergency Of International Concern (PHEIC)* atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia yaitu dengan persyaratan kapasitas inti bagi bandara, pelabuhan dan perlintasan darat agar setiap saat menyediakan akses, fasilitas diagnostik, sumber daya manusia yang berkompeten untuk pemeriksaan alat angkut, orang, barang dan lingkungan guna cegah tangkal faktor risiko penyebab penyakit di pintu masuk negara. Serta merespon kejadian yang dapat menimbulkan PHEIC.

Pada tahun 2026 terdapat penetapan PHEIC yaitu wabah penyakit ebola di RD Kongo dan Uganda. Pada 15 Mei 2026, otoritas kesehatan RD Kongo dan *Africa Centers for Disease Control and Prevention (Africa CDC)* melaporkan kembali wabah penyakit ebola di RD Kongo dan Uganda. Hingga 15 Mei 2026, telah dilaporkan sebanyak 246 (dua ratus empat puluh enam) kasus suspek termasuk 8 (delapan) konfirmasi di Provinsi Ituri dan 80 (delapan puluh) kematian dengan CFR 32,5%. Selain



itu, telah dilaporkan 2 (dua) kasus konfirmasi dengan 1 (satu) kematian di Uganda. Pemeriksaan genomik menunjukkan wabah disebabkan BDBV. Pada tanggal 16 Mei 2026, WHO menetapkan wabah penyakit ebola yang disebabkan BDBV di RD Kongo dan Uganda sebagai PHEIC. Hingga saat ini, Indonesia belum melaporkan adanya kasus terkonfirmasi penyakit Ebola. Meskipun demikian, penyakit yang disebabkan oleh virus Ebola tetap menjadi ancaman kesehatan global karena memiliki tingkat fatalitas yang tinggi serta berpotensi menyebar melalui mobilitas penduduk antarnegara.

Balai kekarantinaan kesehatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi didukung oleh beberapa regulasi antara lain undang-undang kesehatan nomor 17 tahun 2023, Permenkes nomor 10 tahun 2023 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan*, Permenkes No 1 tahun 2026 tentang Kejadian Luar Biasa, Wabah, dan Krisis Kesehatan dan diperkuat dengan Keputusan Direktur Jendral Pencegahan dan Pengendalian Penyakit nomor HK.02.02/C/334/2024 tentang tim kerja di lingkungan unit pelaksana teknis di bidang kekarantinaan kesehatan.

Berbagai tuntutan global, perkembangan regulasi dan tuntutan peningkatan kualitas pelayanan kekarantinaan kesehatan, BKK Kelas I Jayapura terus memperkuat kapasitas sumber daya manusia, tata kelola, digitalisasi, sarana dan prasarana, serta kolaborasi lintas sektor. Oleh karena itu, penyusunan RKT BKK Kelas I Jayapura Tahun 2026 menjadi pedoman strategis dalam menerjemahkan arah kebijakan nasional ke dalam program, kegiatan, dan indikator kinerja yang terukur, sehingga BKK Kelas I Jayapura mampu mendukung Sistem Ketahanan Kesehatan yang tangguh dan responsif serta mendukung pencapaian transformasi sistem kesehatan.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Susunan organisasi BKK Kelas I Jayapura berdasarkan Permenkes Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kekarantinaan Kesehatan bahwa Balai Kekarantinaan Kesehatan Jayapura termasuk dalam klasifikasi Balai



Kekarantinaan Kesehatan Kelas I. Susunan organisasi BKK Kelas I Jayapura tersaji dalam gambar berikut :

Gambar 1. Struktur Organisasi Tahun 2026 BKK Kelas I Jayapura



Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/C/334/2024 tentang Tim Kerja di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan, telah ditetapkan susunan tim kerja yang menjadi penggerak utama pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Tim kerja tersebut terdiri atas lima kelompok, yaitu:

1. Tim Kerja Surveilans dan Penindakan Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan yang didukung oleh jabatan fungsional epidemiolog.
2. Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Alat Angkut dan Barang yang didukung oleh jabatan fungsional epidemiolog.
3. Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan yang didukung oleh jabatan fungsional entomology dan sanitarian.



4. Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Orang, Kegawatdaruratan, dan Situasi Khusus yang didukung oleh jabatan fungsional dokter, perawat dan pranata laboratorium kesehatan.
5. Tim Kerja Layanan Publik dan Zona Integritas yang didukung oleh jabatan fungsional perencana, analis pengelola keuangan APBN, pengelola BMN, penata layanan operasional dan operator layanan operasional.

Selain tim kerja tersebut, terdapat juga sub bagian administrasi umum yang didukung oleh jabatan fungsional pranata keuangan APBN, analis pengelola keuangan APBN, pengelola layanan operasional dan operator layanan operasional.

Setiap tim kerja memiliki tugas menyusun rencana kegiatan dan anggaran untuk mendukung pencapaian target kinerja, melakukan pembagian peran antar anggota, memperkuat koordinasi lintas tim, melaksanakan pemantauan dan evaluasi sesuai substansi tugas, menyusun laporan kegiatan, serta menyampaikan laporan kepada pimpinan. Seluruh tim kerja bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan.

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, dibentuk wilayah kerja yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Wilayah kerja merupakan unit operasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan. Selain itu, kelompok jabatan fungsional berperan memberikan pelayanan profesional sesuai dengan keahlian masing masing guna menjamin mutupenyelenggaraan kekarantinaan kesehatan.

Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Jayapura memiliki wilayah kerja yang tersebar pada beberapa kabupaten/kota di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Pengunungan, yaitu:

1. Wilayah Kerja Bandara Sentani

Terletak di Kabupaten Jayapura dan dapat ditempuh melalui jalur darat sekitar satu jam. Wilayah kerja ini didukung oleh sembilan sumber daya manusia yang terdiri atas epidemiolog kesehatan ahli muda, sanitarian ahli muda, entomolog kesehatan muda, dokter ahli pertama, perawat ahli pertama, perawat



terampil dan pranata laboratorium ahli pertama. Gedung kantor merupakan milik Kementerian Kesehatan dan berdiri di atas lahan milik PT. Angkasa Pura.

2. Wilayah Kerja PLBN Skouw

Terletak di Kota Jayapura dan dapat ditempuh melalui jalur darat sekitar satu sampai dengan dua jam, dan berbatasan langsung dengan *Papua New Guinee*. Wilayah kerja ini didukung oleh enam sumber daya manusia yang terdiri atas sanitarian ahli muda, sanitarian ahli pertama, dokter ahli pertama, perawat terampil, pranata laboratorium terampil dan entomolog terampil. Gedung kantor merupakan milik Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

3. Wilayah Kerja Bandara Wamena

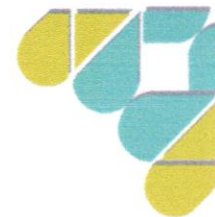
Terletak di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pengunungan dan dapat ditempuh melalui jalur udara sekitar satu jam. Wilayah kerja ini didukung oleh empat sumber daya manusia yang terdiri atas entomolog ahli pertama, perawat ahli pertama, epidemiolog kesehatan terampil dan pranata laboratorium kesehatan terampil. Gedung kantor merupakan milik Kementerian Kesehatan dan terdapat klinik berada di area Bandara Wamena yang merupakan milik UPBU Wamena.

4. Wilayah Kerja Pelabuhan Sarmi

Terletak di Kabupaten Sarmi dan dapat ditempuh melalui jalur darat sekitar delapan jam, jalur laut sekitar delapan belas jam dan jalur udara sekitar empat puluh lima menit dengan jadwal satu minggu sekali dengan. Wilayah kerja ini didukung oleh tiga sumber daya manusia yang terdiri atas sanitarian mahir, entomolog kesehatan ahli pertama dan perawat terampil. Gedung kantor merupakan milik Kementerian Kesehatan.

5. Wilayah pelabuhan laut Jayapura

Terletak di Kota Jayapura dan dapat di tempuh sekitar 15 menit dari kantor induk. Kegiatan pengawasan dilaksanakan setiap hari oleh petugas secara bergiliran sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

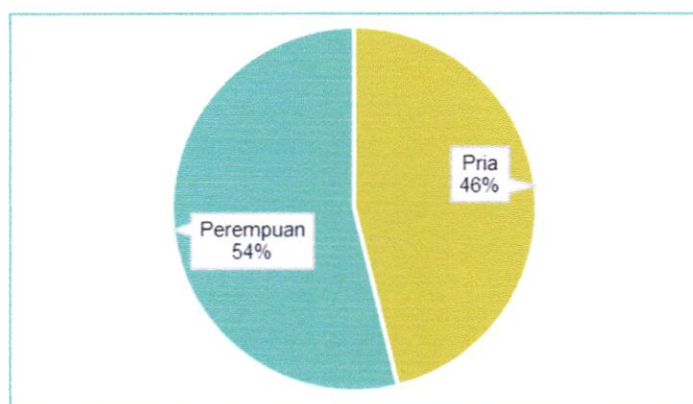


C. SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki BKK Kelas I Jayapura pada tahun 2026 terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 65 orang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 46 orang dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) sebanyak 19 orang. Selain ASN untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi BKK Kelas I Jayapura di bantu juga tenaga *outsourcing* sebanyak 25 orang.

Jumlah ASN BKK Kelas I Jayapura berdasarkan jenis kelamin, perempuan sebanyak 35 orang (54%) dan pria sebanyak 30 orang (46%) tergambar dalam grafik di bawah ini

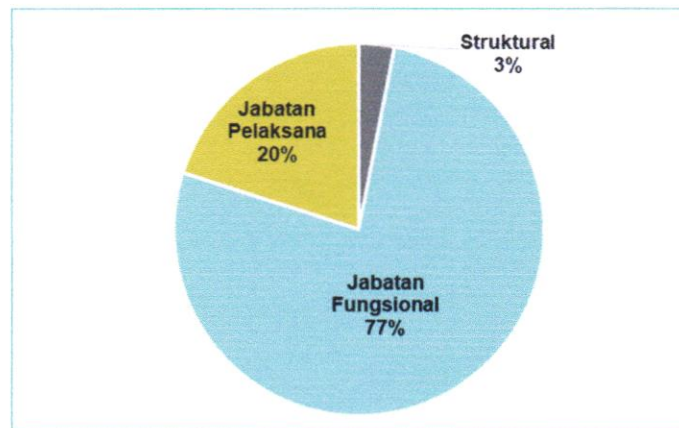
Grafik 1. Jumlah ASN berdasarkan Jenis Kelamin BKK Kelas I Jayapura Tahun 2026



Berdasarkan jabatan ASN di BKK Kelas I Jayapura terdiri dari 3 jabatan yaitu jabatan struktural, jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Jabatan struktural sebanyak 2 orang (3%), jabatan fungsional sebanyak 50 orang (77%) dan jabatan pelaksana lebih sedikit sebanyak 13 orang (20%) tergambar dalam grafik di bawah ini:



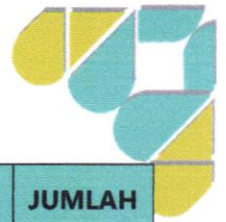
Grafik 2. Jumlah ASN berdasarkan Jenis Jabatan Tahun 2026 BKK Kelas I Jayapura



Dilihat dari grafik di atas, jenis jabatan terbanyak yaitu jabatan fungsional dengan dua puluh empat jenis jabatan fungsional. Rincian jabatan dan jenis jabatan memberikan gambaran mengenai komposisi sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Jayapura. Rincian tersebut disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1. Jumlah ASN berdasarkan Jenis Jabatan BKK Kelas I Jayapura Tahun 2026

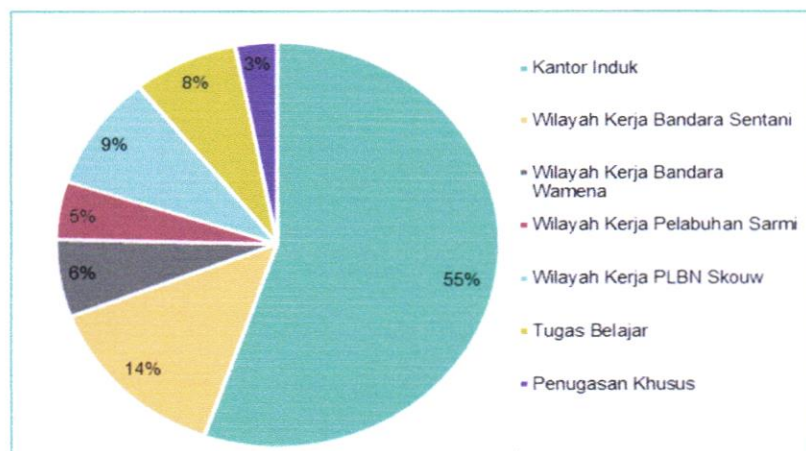
NO	JENIS JABATAN	URAIAN JABATAN	JUMLAH
1	Jabatan Struktural	Kepala Balai	1
		Kepala Sub Bagian Admsinitrasi Umum	1
2	Jabatan Fungsional	Epidemiologi Kesehatan Ahli Madya	2
		Epidemiologi Kesehatan Ahli Muda	9
		Epidemiologi Kesehatan Ahli Pertama	2
		Epidemiologi Kesehatan Terampil	2
		Sanitarian Ahli Madya	1
		Sanitarian Ahli Muda	3
		Sanitarian Ahli Pertama	1
		Sanitarian Mahir	2
		Entomolog Kesehatan Ahli Muda	2
		Entomolog Kesehatan Ahli Pertama	4
		Entomolog Kesehatan Terampil	1
		Dokter Ahli Muda	1
		Dokter Ahli Pertama	2
		Perawat Ahli Pertama	2
		Perawat Penyelia	1



NO	JENIS JABATAN	URAIAN JABATAN	JUMLAH
		Perawat Terampil	5
		Pranata Laboratorium kesehatan Ahli Pertama	1
		Pranata Laboratorium kesehatan Penyelia	1
		Pranata Laboratorium kesehatan Terampil	2
		Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	1
		Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	1
		Pranata Keuangan APBN Mahir	1
		Perencana Ahli Pertama	2
		Penata Laksana Barang Terampil	1
3	Jabatan Pelaksana	Penata Kelola Layanan Kesehatan	3
		Pengelola Layanan Kesehatan	2
		Penata Layanan Operasional	1
		Operator Layanan Operasional	6
		Pengelola Layanan Operasional	1

Seluruh ASN BKK Kelas I Jayapura tersebar merata di kantor induk, di empat wilayah kerja dan terdapat ASN yang penugasan khusus di PASKAS Kemenkes sebanyak satu orang, Badan Gizi Nasional sebanyak satu orang dan tiga orang ASN yang sedang melaksanakan tugas belajar. Sebaran ASN terbanyak berada di kantor induk, yaitu sebanyak 55% (36 orang). Hal ini karena kantor induk selain berfungsi sebagai pusat administrasi dan koordinasi, juga menjadi lokasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kekarantinaan kesehatan untuk wilayah kerja Pelabuhan Laut Jayapura. Sebaran ASN BKK Jayapura secara rinci dapat dilihat pada grafik berikut:

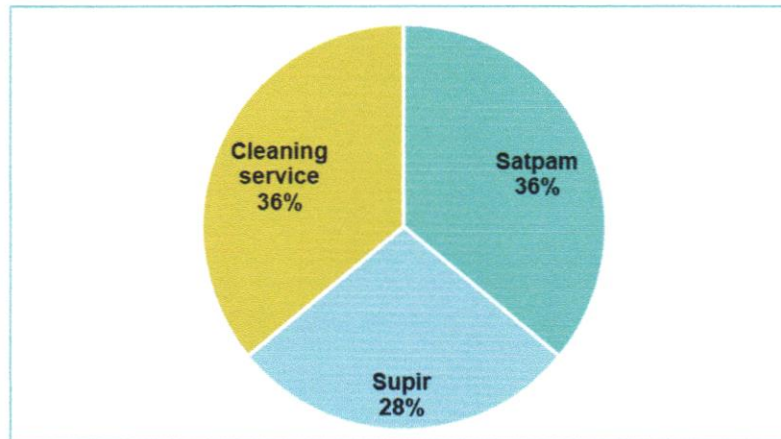
Grafik 3. Jumlah ASN berdasarkan Penempatan Tahun 2026 BKK Kelas I Jayapura



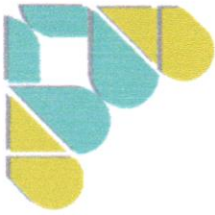


Selain ASN untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi di BKK Kelas I Jayapura, terdapat juga tenaga *outsourcing* atau alih daya. Tenaga *outsourcing* berada di kantor induk dan juga tersebar di seluruh wilayah kerja BKK Kelas I Jayapura. Tenaga *outsourcing* terbagi dalam 3 jenis yaitu satpam, supir dan petugas kebersihan.

Grafik 4. Jumlah Outsorcing berdasarkan Jenis Tahun 2026 BKK Kelas I Jayapura



Tenaga *outsourcing* dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia pada formasi tertentu yang belum dapat dipenuhi oleh ASN. Keberadaan tenaga alih daya berperan sebagai tenaga pendukung dalam pelaksanaan kegiatan operasional dan administrasi, sehingga dapat menjaga kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi serta mendukung penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.



BAB II.

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

A. VISI

Visi Presiden Republik Indonesia adalah “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, selaras dengan visi tersebut, Kementerian Kesehatan menetapkan visi Tahun 2025-2029 yakni “Masyarakat Yang Sehat Dan Produktif Guna Mewujudkan Indonesia Emas 2045”.

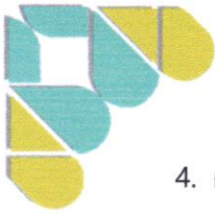
Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit (P2) menetapkan visi selaras dengan visi Kementerian Kesehatan yakni “Populasi bebas penyakit mendukung Masyarakat yang Sehat dan Produktif guna Mewujudkan Indonesia Emas 2045”.

Balai Kekarantinaan Kesehatan sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Ditjen P2 menetapkan visi yang sejalan dengan visi Ditjen P2 yakni “Pintu Masuk serta bandara dan pelabuhan domestik bebas dari penularan penyakit dan faktor risiko penyakit berpotensi KLB/wabah”.

B. MISI

Kementerian Kesehatan melaksanakan Misi (Asta Cita) Presiden dan Wakil Presiden Periode 2025-2029 terutama pada Asta Cita nomor 4, yaitu “memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas”. Asta cita tersebut dituangkan dalam RPJMN 2025-2029 sebagai Prioritas nasional (PN) ke-4 dalam RPJMN. Untuk mendukung PN 4 pada RPJMN dan mewujudkan Visi Kementerian Kesehatan Periode 2025-2029, maka ditetapkan Misi Kementerian Kesehatan sebagai berikut :

1. mewujudkan masyarakat sehat pada seluruh siklus hidup;
2. memenuhi layanan kesehatan yang baik, adil dan terjangkau;
3. mengimplementasikan sistem ketahanan kesehatan yang tangguh dan responsif;



4. menguatkan tata kelola dan pembiayaan kesehatan yang efektif, adil dan berkelanjutan;
5. mengembangkan teknologi kesehatan yang maju; dan
6. mewujudkan Kementerian Kesehatan yang agile, efektif dan efisien.

Untuk mewujudkan misi Kementerian Kesehatan, Ditjen P2 memiliki misi sebagai berikut:

1. menurunkan beban penyakit menular dan tidak menular melalui penguatan intervensi promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan/atau paliatif berbasis siklus hidup;
2. menjamin ketersediaan layanan penanggulangan penyakit yang bermutu, merata, dan berkeadilan di seluruh tingkat pelayanan kesehatan;
3. meningkatkan penerapan gaya hidup sehat dan pengelolaan faktor risiko penyakit di masyarakat;
4. memperkuat imunisasi nasional sebagai perlindungan utama terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi;
5. meningkatkan kualitas sistem ketahanan kesehatan melalui upaya penyehatan, pengamanan dan pengendalian faktor risiko lingkungan;
6. meningkatkan perubahan perilaku hidup bersih dan sehat melalui pendekatan STBM;
7. meningkatkan sistem ketahanan kesehatan melalui penguatan sistem surveilans dan respons cepat terhadap kejadian luar biasa/wabah secara terintegrasi, berbasis data, dan teknologi di wilayah dan pintu masuk negara;
8. meningkatkan akuntabilitas program penanggulangan penyakit melalui perencanaan berbasis data, transparansi anggaran dan pelaporan program;
9. monitoring dan evaluasi berkala dan objektif;
10. meningkatkan tata kelola program penanggulangan penyakit melalui perencanaan berbasis data, transparansi anggaran, evaluasi berkala, serta penguatan kapasitas SDM dan kolaborasi multisektor.



Guna mewujudkan misi Kementerian Kesehatan dan mendukung misi Ditjen P2, Balai Kekarantinaan Kesehatan mempunyai misi sebagai berikut :

1. memantapkan sistem surveilans, kemampuan deteksi penyakit, pencegahan dan pengendalian faktor risiko penyakit berpotensi KLB/wabah;
2. mewujudkan tata kelola pelayanan dan dukungan manajemen kekarantinaan kesehatan yang bersih dan akuntabel yang didukung oleh sistem informasi yang terintegrasi.

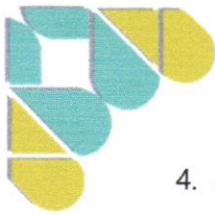
C. TUJUAN

Dalam rangka melaksanakan visi dan misi, Kementerian Kesehatan menetapkan tujuh tujuan antara lain :

1. masyarakat sehat di setiap siklus hidup dengan Indikator Usia harapan Hidup Sehat/Healthy Adjusted Life Expectancy (HALE);
2. layanan Kesehatan yang baik, adil dan terjangkau, dengan Indikator;
3. cakupan layanan Kesehatan Esensial /Universal Health Coverage (UHC) Service Coverage Index;
4. sistem Ketahanan yang tangguh dan responsive, dengan Indikator ; International Health Regulation (IHR) score;
5. tata Kelola dan Pembiayaan Kesehatan yang efektif, adil dan berkelanjutan dengan Indikator: Rasio belanja Kesehatan per kapita terhadap usia;
6. teknologi Kesehatan yang maju dengan Indikator: Persentase populasi yang menggunakan Sistem Informasi Kesehatan Nasional;
7. kementerian Kesehatan yang agile, efektif dan efisien dengan Indikator Nilai Good Public Governance (GPG) Kementerian Kesehatan.

Searah dengan tujuan Kementerian Kesehatan,Ditjen P2 menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. masyarakat bebas penyakit menular dan tidak menular;
2. masyarakat berperilaku hidup sehat;
3. masyarakat mendapat layanan imunisasi lengkap sesuai siklus hidup;



4. masyarakat hidup dalam Lingkungan sehat;
5. sistem yang mampu mencegah, mendeteksi dan merespon ancaman kesehatan secara efektif dan cepat
6. tata kelola Ditjen P2 yang agile, efektif dan efisien.

Sejalan dengan tujuan Ditjen P2, Balai Kekarantinaan Kesehatan menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. alat angkut, orang, barang, dan lingkungan bebas dari penularan penyakit dan faktor risiko Kesehatan;
2. terbangunnya sistem respon cepat kegawatdaruratan medik dan rujukan, serta pelayanan kesehatan situasi khusus;
3. terwujudnya pelayanan kekarantinaan kesehatan yang bersih, akuntabel dan prima;
4. terwujudnya SDM yang unggul dan kompeten serta sarana prasarana sesuai standar dalam bidang kekarantinaan kesehatan;
5. terwujudnya sistem informasi kekaratinaan Kesehatan yang terintegrasi dan interoperable dengan stakeholder terkait.

D. SASARAN STRATEGIS

Kementerian Kesehatan memiliki Sasaran Strategis untuk periode tahun 2025–2029 yang disusun sebagai panduan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan kesehatan nasional, antara lain :

1. meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan promotif dan preventif;
2. meningkatnya literasi kesehatan masyarakat;
3. meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan primer, lanjutan dan labkes;
4. meningkatnya kesiapsiagaan & tanggap darurat kesehatan;
5. meningkatnya kualitas tata kelola dan pembiayaan kesehatan di pusat dan daerah;
6. meningkatnya kualitas ekosistem teknologi kesehatan dan uji klinis;
7. meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian Kesehatan.



Sasaran Strategis Program Ditjen P2 Tahun 2025–2029 disusun sebagai bagian integral dari upaya nasional dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 yaitu :

1. meningkatnya proporsi kabupaten/kota yang menyelenggarakan skrining penyakit tidak menular prioritas;
2. meningkatnya pengendalian penyakit dan faktor risiko penyakit tidak menular;
3. meningkatnya tatalaksana penyakit kanker;
4. menurunnya proporsi perokok usia 10-21 tahun;
5. meningkatnya produk pangan olahan yang beredar di masyarakat memenuhi batas maksimum kandungan Gula Garam Lemak (GGL);
6. meningkatnya Skrining kolesterol pada Puskemas;
7. menurunnya insiden penyakit menular;
8. meningkatnya eliminasi penyakit menular;
9. menurunnya kematian akibat penyakit menular;
10. menurunnya proporsi obesitas di kabupaten/kota;
11. tercapainya imunisasi lengkap pada populasi;
12. menurunnya kejadian penyakit menular sensitif iklim;
13. meningkatnya pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara;
14. meningkatnya kabupaten/kota yang mendeteksi, merespon dan mengendalikan faktor risiko kesehatan yang berpotensi KLB/wabah;
15. meningkatnya desa/kelurahan yang menerapkan lima pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) secara berkelanjutan;
16. meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan di kabupaten/kota
17. menurunnya jumlah KLB Keracunan Pangan;
18. meningkatnya kabupaten/kota yang menyelenggarakan adaptasi perubahan iklim bidang Kesehatan;
19. meningkatnya tata kelola organisasi dan pengendalian intern Kementerian Kesehatan.



Demi terwujudnya Sasaran Strategis Kemenkes dan Ditjen P2 tahun 2025 – 2029, Balai Kekarantina Kesehatan mempunyai sasaran strategis antara lain :

1. meningkatnya pintu masuk yang melaksanakan deteksi penyakit dan faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/wabah;
2. meningkatnya tata kelola organisasi dan pengendalian intern Kementerian Kesehatan.



BAB III.

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Indikator kinerja kegiatan Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK) tahun 2025 – 2029 yang ditetapkan pada Rencana Aksi Kegiatan yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Kementerian Kesehatan, antara lain : persentase pintu masuk yang melaksanakan deteksi penyakit dan faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/Wabah, nilai SAKIP Unit Kerja, nilai Kinerja Anggaran Unit Kerja, persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti, persentase realisasi anggaran, penerbitan dokumen layanan kekarantinaan kesehatan untuk alat angkut dalam kategori merah kurang dari 2x24 jam dan penyalahgunaan kewenangan Kepala BKK *zero tolerance*.

1. RENCANA AKSI KEGIATAN TAHUN 2025 – 2029

Penetapan target indikator kegiatan yang dituangkan dalam rencana aksi kegiatan (RAK) BKK Kelas I Jayapura disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2. Distribusi Target Indikator Kinerja Kegiatan dalam RAK Tahun 2025 – 2029
BKK Kelas I Jayapura

INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM/ KINERJA PROGRAM	KODE	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET TAHUN 2025	TARGET TAHUN 2026	TARGET TAHUN 2027	TARGET TAHUN 2028	TARGET TAHUN 2029
Meningkatnya Pengendalian faktor risiko di Pintu masuk negara							
Persentase Faktor risiko penyakit di Pintu masuk negara yang dikendalikan							
	IKK 24.2.1	Pintu masuk yang melaksanakan deteksi penyakit dan faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/Wabah	73%	76%	79%	82%	85%
Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian Kesehatan							
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi dan Pengendalian Intern Kementerian Kesehatan							
	IKM 33.1.1	Nilai SAKIP Unit Kerja	83	83	83,25	83,30	83,35



INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM/ KINERJA PROGRAM	KODE	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET TAHUN 2025	TARGET TAHUN 2026	TARGET TAHUN 2027	TARGET TAHUN 2028	TARGET TAHUN 2029
	IKM 33.2.1	Nilai Kinerja Anggaran Unit Kerja	90	92,75	92,75	92,95	93,15
	IKM 33.4.1	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti	-	95%	95%	95%	95%
	IKD 33.1.1	Persentase realisasi anggaran	96%	96%	96%	96%	96%
	IKD 33.1.2	Penerbitan dokumen layanan kekarantina kesehatan untuk alat angkut dalam kategori merah kurang dari 2x24 jam	-	95%	95%	95%	95%
	IKD 33.1.3	Penyalahgunaan kewenangan Kepala BKK zero tolerance	-	0	0	0	0

2. RENCANA KERJA TAHUN 2026

Dalam menunjang tugas pokok dan fungsi BKK Kelas I Jayapura dalam melaksanakan upaya cegah tangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko Kesehatan di pintu masuk negara maupun pelabuhan, bandara domestik, maka ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dengan target yang harus dilaksanakan/dicapai, adapun indikator dan target tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3. Distribusi Rencana Kerja Tahunan Tahun 2026 BKK Kelas I Jayapura

INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM/ KINERJA PROGRAM	KODE	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET TAHUN 2026	ALOKASI ANGGARAN
Meningkatnya Pengendalian faktor risiko di Pintu masuk negara				
Persentase Faktor risiko penyakit di Pintu masuk negara yang dikendalikan				
	IKK 24.2.1	Pintu masuk yang melaksanakan deteksi penyakit dan faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/Wabah	76%	429.991.000



INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM/ KINERJA PROGRAM	KODE	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET TAHUN 2026	ALOKASI ANGGARAN
Meningkatnya Pengendalian faktor risiko di Pintu masuk negara				
Persentase Faktor risiko penyakit di Pintu masuk negara yang dikendalikan				
Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian Kesehatan				
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi dan Pengendalian Intern Kementerian Kesehatan				
	IKM 33.1.1	Nilai SAKIP Unit Kerja	83	
	IKM 33.2.1	Nilai Kinerja Anggaran Unit Kerja	92,75	13.006.847.000
	IKM 33.4.1	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti	95%	
	IKD 33.1 .1	Persentase realisasi anggaran	96%	
	IKD 33.1.2	Penerbitan dokumen layanan kekarantinaan kesehatan untuk alat angkut dalam kategori merah kurang dari 2x24 jam	95%	
	IKD 33.1.3	Penyalahgunaan kewenangan Kepala BKK zero tolerance	0 Penyalahgunaan	
TOTAL				13.436.838.000

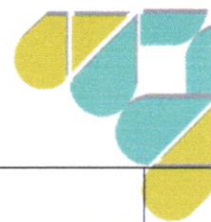
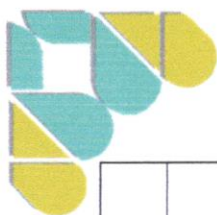
3. RINCIAN KEGIATAN BERDASARKAN KEGIATAN

Dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BKK Kelas I Jayapura, pelaksanaan program dan kegiatan didukung oleh anggaran yang dialokasikan dalam RKA-KL Tahun Anggaran 2026. Pendanaan tersebut bersumber dari dua jenis dana, yaitu Rupiah Murni (RM) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari penerimaan atas layanan kekarantinaan kesehatan. Dukungan anggaran ini dimanfaatkan untuk membiayai seluruh pelaksanaan program, kegiatan, dan operasional dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kekarantinaan kesehatan di wilayah kerja BKK Kelas I Jayapura, yang tersaji dalam tabel di bawah ini :



Tabel 4. Distribusi Kegiatan Rincian Output Tahun 2026 BKK Kelas I Jayapura

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	KEGIATAN (KOMPONEN)	JUMLAH LAYANAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
1	Pintu masuk yang melaksanakan deteksi penyakit dan faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/Wabah				429.991.000	PNBP
		Layanan Pengendalian Faktor Risiko Lingkungan	Pengendalian Faktor Risiko Lingkungan	4	7.624.000	
		Layanan Pemeriksaan Orang, Barang, Alat Angkut	Pemeriksaan Orang, Barang, Alat Angkut	2	1.360.000	
		Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit di Bandar Udara	Pelaksanaan Kekarantinaan Kesehatan di Bandara	36	31.680.000	
		Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit di PLBN	Layanan Kekarantinaan Kesehatan di PLBN	45	39.600.000	
		Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit Pada situasi Khusus	Pelayanan kesehatan pada situasi khusus	14	23.660.000	
		Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit DBD	Pengendalian vektor DBD	8	9.808.000	
		Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit PES dan Leptospirosis	Layanan survei vektor pes	-	-	
		Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit Diare	Pengendalian vektor diare	10	4.820.000	
		Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit Malaria	Pengendalian Vektor Malaria	2	2.724.000	
		Layanan Survey Faktor Risiko Penyakit DBD	Pelaksanaan survei vektor DBD	0		
		Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit Malaria	Survei vektor malaria	30	51.600.000	
		Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit Diare	Survei vektor diare	0		
		Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit HIV AIDS	Pelaksanaan pencegahan pengendalian HIV AIDS	6	7.884.000	
		Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit TB	Deteksi dini terduga TB	3	16.365.000	
		Layanan Kegawatdaruratan dan Rujukan	Layanan kegawatdaruratan	18	14.832.000	
		Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit di Pelabuhan	Layanan Kekarantinaan Kesehatan di Pelabuhan	30	19.800.000	
		Layanan Penemuan Aktif Surveilans Migrasi Malaria	Layanan Penemuan Aktif Surveilans Migrasi Malaria	2	1.940.000	



		Pengadaan Alat dan Bahan Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk	Pengadaan Alat dan Bahan Kesehatan	6	163.387.000	
2	Nilai SAKIP Unit Kerja	-	-	-	-	-
3	Nilai Kinerja Anggaran Unit Kerja					13.006.847.000 RM
		Layanan Perkantoran	Gaji dan Tunjangan	1	10.185.846.000	
			Operasional dan Pemeliharaan Kantor		2.821.001.000	
4	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti	-	-	-	-	-
5	Persentase realisasi anggaran	-	-	-	-	-
6	Penerbitan dokumen layanan kekarantinaan kesehatan untuk alat angkut dalam kategori merah kurang dari 2x24 jam	-	-	-	-	-
7	Penyalahgunaan kewenangan Kepala BKK zero tolerance	-	-	-	-	-
TOTAL ANGGARAN					13.436.838.000	

4. KERANGKA PENDANAAN

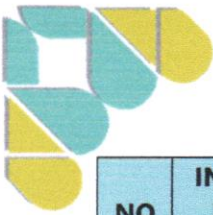
Perhitungan kebutuhan pendanaan disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi, prioritas program dan kegiatan, serta prinsip akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan transparansi. Penyusunan pendanaan diarahkan untuk mendukung pencapaian target kinerja dan pelaksanaan tugas serta fungsi organisasi secara optimal. Selain memenuhi kebutuhan pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan, perencanaan pendanaan juga memperhatikan prakiraan maju sebagai dasar



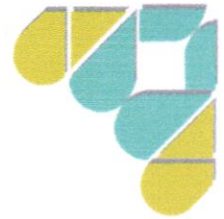
dalam menjamin keberlanjutan program, menjaga stabilitas kinerja organisasi, serta mendukung pencapaian sasaran strategis pada tahun-tahun berikutnya. Rincian perhitungan kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud disajikan pada tabel berikut :

Tabel 5. Kerangka Pendanaan Tahun Berjalan dan Perkiraan Maju Tahun 2025 - 2029
BKK Kelas I Jayapura

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	ANGGARAN				
		2025	2026	2027	2028	2029
1	Pintu masuk yang melaksanakan deteksi penyakit dan faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/Wabah	1.899.814.000	429.991.000	2.489.814.000	2.500.620.000	2.800.500.000
2	Nilai SAKIP Unit Kerja	885.944.000	-	418.687.000	420.600.000	423.000.000
3	Nilai Kinerja Anggaran Unit Kerja	12.156.734.000	13.006.847.000	13.295.277.000	14.100.000.000	14.860.000.000
4	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti	-	-	-	-	-
5	Persentase realisasi anggaran	596.066.000	-	1.085.486.000	1.150.700.000	1.200.300.000
6	Penerbitan dokumen layanan kekarantinaa n kesehatan untuk alat angkut dalam kategori merah	-	-	-	-	-



NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	ANGGARAN				
		2025	2026	2027	2028	2029
	kurang dari 2x24 jam					
7	Penyalahgun aan kewenangan Kepala BKK zero tolerance	-	-	-	-	-
TOTAL		15.538.558.000	13.436.838.000	17.289.264.000	18.171.920.000	19.283.800.000



BAB IV.

PENUTUP

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK) Kelas I Jayapura, agar berdaya guna dan berhasil diperlukan Suatu Rencana Kerja Tahunan (RKT) jangka 1 tahun yang disusun secara sistematis. Rencana Kerja Tahunan BKK Kelas I Jayapura tahun 2026 merupakan pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama satu tahun pada tahun 2026.

RKT BKK Kelas I Jayapura tahun 2026 menggambarkan tentang rencana kegiatan, sasaran kegiatan, output kegiatan, indikator kinerja kegiatan, target yang akan di capai selama tahun 2026, alokasi anggaran termasuk sumber pembiayaannya. Pemantauan pelaksanaan RKT dilaksanakan dan dievaluasi setiap bulan untuk membahas permasalahan yang dihadapi serta tindak lanjut atas permasalahan tersebut. Dengan demikian diharapkan RKT tahun 2026 yang telah disusun bisa memperlancar pelaksanaan kegiatan/program yang akan dilaksanakan selama tahun berjalan.



LAMPIRAN



TARGET INDIKATOR KINERJA BULANAN TAHUN 2026

NO	INDIKATOR	CASCADING INDIKATOR	TARGET	TARGET BULANAN											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	Des
1	Pintu masuk yang melaksanakan deteksi penyakit dan faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/Wabah	Persentase pintu masuk negara maupun pelabuhan/ bandara domestik yang melakukan pengawasan/ pemeriksaan faktor risiko alat angkut	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
		Persentase pintu masuk negara maupun pelabuhan/ bandara domestik yang melakukan pengawasan/ pemeriksaan faktor risiko orang/pelaku perjalanan	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
		Persentase pintu masuk negara maupun pelabuhan/ bandara domestik yang melakukan	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%



NO	INDIKATOR	CASCADING INDIKATOR	TARGET	TARGET BULANAN											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	Des
		pengawasan/ pemeriksaan faktor risiko barang													
		Persentase pintu masuk negara maupun pelabuhan/ bandara domestik yang melakukan pengawasan/ pemeriksaan faktor risiko lingkungan	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
		Persentase pencatatan dan pelaporan surveilans alat angkut, orang, barang, dan lingkungan melalui sistem informasi kekarantinaan kesehatan	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
2	Nilai SAKIP Unit Kerja		83 Nilai	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
3	Nilai Kinerja Anggaran Unit Kerja		92,75 Nilai	10	20	56	60	62	67	73	77	79,23	86,85	91,10	92,75
4	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti		95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
5	Persentase realisasi anggaran		96%												



NO	INDIKATOR	CASCADING INDIKATOR	TARGET	TARGET BULANAN											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	Des
6	Penerbitan dokumen layanan kekarantinaan kesehatan untuk alat angkut dalam kategori merah kurang dari 2x24 jam		95%	9%	15%	25%	30%	36%	55%	60%	66%	74%	80%	86%	96%
7	Penyalahgunaan kewenangan Kepala BKK zero tolerance		0 Penyalahgunaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0